

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah memiliki sumber pendapatan yang diperoleh dari berbagai aktivitas sektor ekonomi. Sumber pendapatan ini digunakan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan wilayah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah mencakup berbagai jenis penerimaan seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Baldrick, 2017).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), merupakan salah satu penerimaan pajak daerah. PBB-P2 merupakan pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan. Penerimaan pajak ini berperan penting dalam mendukung berbagai kepentingan pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Valentina dan Aji, 2010).

PBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak yang menggunakan asas pemungutan *official assessment system*, sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan jumlah pajak yang terutang (Siti Resmi, 2014). Wewenang tersebut membuat pemerintah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan PBB-P2, dimulai dari pengumpulan data dan informasi terkait tanah dan bangunan di wilayah daerah. Data tersebut kemudian diolah untuk menentukan nilai properti, mencakup estimasi nilai tanah dan bangunan berdasarkan lokasi, ukuran, dan kondisi. Nilai properti digunakan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Pemerintah juga bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan PBB-P2 yang lain, seperti menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang serta jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada wajib pajak, memberikan informasi terkait tenggat waktu dan prosedur pembayarannya, menerima pembayaran hingga melakukan pelaporan administratif. Kemajuan dan perkembangan suatu daerah dipengaruhi oleh kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik, tingkat pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pelaksanaan kegiatan yang mendorong pengembangan sektor ekonomi.

Berita yang diunggah oleh Jatim Times pada tanggal 08 November 2022 berjudul “Penerimaan PBB-P2 belum Capai Target, Bapenda Blitar Kumpulkan Seluruh Camat” menggambarkan situasi penerimaan PBB-P2 hingga bulan Oktober hanya mencapai 74,41% dari target yang ditetapkan sebesar 36,3 miliar rupiah. Upaya yang dilakukan Bapenda Kabupaten Blitar untuk mencapai target penerimaan adalah dengan mengumpulkan kepala daerah dan lurah beserta jajarannya untuk diberikan pembinaan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik untuk merealisasikan target penerimaan PBB-P2 di masing-masing daerah.

Pemberitaan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki kesadaran untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2. Langkah awal yang diambil adalah mengevaluasi kinerja pegawai yang memberikan pelayanan publik. Pelayanan yang baik dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan di daerah. Pegawai memiliki tanggungjawab dalam menyebarkan informasi tentang pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, terutama kepada wajib pajak. Informasi yang tepat mengenai ketentuan perpajakan akan membantu masyarakat menyadari pentingnya berkontribusi dalam pembayaran pajak dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Pengetahuan perpajakan serta kualitas pelayanan publik yang diberikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Uraian latar belakang di atas, membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kinerja Pelayanan Pegawai terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Kasus di Kabupaten Blitar)”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah diperlukan agar penelitian ini memiliki fokus dan tujuan yang jelas, memiliki relevansi yang tinggi dengan masalah yang ingin diselesaikan, membantu untuk mempersempit lingkup penelitian, sehingga penulis mampu menentukan variabel yang relevan untuk diteliti. Berdasarkan rumusan masalah, diharapkan pembahasan tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian yang sudah ditentukan. Adapun rumusan masalah yang diangkat dari latar belakang di atas adalah :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Blitar?

2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana pengaruh kinerja pelayanan pegawai dalam memberikan pelayanan publik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Blitar?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap topik yang dipilih, yaitu terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak, pengaruh kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik terhadap pencapaian target penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Blitar. Berikut adalah tujuan dari penelitian ini :

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Blitar.
2. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Blitar.
3. Mengetahui pengaruh kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Blitar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang signifikan dalam bidang ilmu perpajakan, pengembangan penelitian terkait indikator-indikator yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Berikut beberapa rincian manfaat yang dapat dijelaskan oleh penulis :

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman dan pengetahuan dalam bidang ilmu perpajakan, terutama mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian lebih lanjut pada bidang yang sama, khususnya mengenai PBB-P2.
3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru tentang upaya peningkatan penerimaan PBB-P2, sehingga pihak pegawai mampu mengidentifikasi strategi dan kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan pajak .

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian ini secara garis besar tersusun dari lima bab yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penelitian yang menjelaskan konteks dan alasan mengapa penelitian ini dilakukan.

Selain itu, terdapat rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, dan manfaat penelitian bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas secara mendalam mengenai rumusan masalah yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Pembahasan bab ini dilakukan dengan merujuk pada dasar-dasar teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, pengaruh pegawai, dan penerimaan PBB-P2.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Terdapat penjabaran mengenai operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang akan digunakan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, serta metode analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis. Hasil penelitian ini tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan kinerja pelayanan pegawai dapat berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan PBB-P2.

BAB V Penutup

Bab ini berisi ringkasan dari bab-bab sebelumnya, serta kesimpulan yang diambil dari penelitian yang sudah dilakukan. Bab ini akan membantu memberikan gambaran tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan kinerja pelayanan pegawai terhadap pencapaian target penerimaan PBB-P2.